

## ABSTRAK

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisa hukum tindak pidana pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Mobil di wilayah hukum kepolisian Resor Kudus. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis , yaitu penelitian berdasarkan pelaksanaan dalam upaya memperoleh data primer didahului dengan penelitian kepustakaan dan wawancara di Polres Kudus dan Kantor Samsat Kudus dan keseluruhan data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut, Mekanisme pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus telah terkomputerisasi tetapi belum mencakup semua sistem kerja, dengan semakin bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor dan masalah lain yang terkait maka diperlukan satu sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan mekanisme pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berkepentingan. BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor,

Penegak hukum Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan BPKB, yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat. Yaitu menjerat terdakwa dengan Pasal 263 (1) KUHPidana. Sebab semua unsur yang ada dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi dan saling mencocoki dan Hambatan yang dihadapi SAMSAT Kudus dalam menanggulangi Pealsuan BPKB mobil, untuk mengungkap suatu kasus pemalsuan BPKB bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak hambatan-hambatanyang dihadapi oleh pihak SAMSAT, Hambatan yang di hadapi pihak SAMSAT Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menayakan status kendaraanyang akan dibeli sebelum terjadi transaksi jual beli pada kantor SAMSAT. Masih adanya jaringan atau kelompok penvetak BPKB palsu, no rangka dan no mesinpada kendaraan bermotor hasil kejahatan

**Kata Kunci : *Analisis Hukum dan Pemalsuan***

## ABSTRACT

The purpose and this study is to know the legal analysis of criminal fraud book vehicle owners (BPKB) Car in the area of police resort of Kudus resort. This research is a sociological juridical legal research, ie research based on implementation in the effort to obtain primary data preceded by library research and interviews at Polres Kudus and Kantor Samsat Kudus and overall data obtained is analyzed quantitatively.

Based on the results of the research are as follows, Mechanism of service at Joint Office of Samsat of Kudus Regency has been computerized but not yet covered all work system, with increasing ownership of motor vehicle and other related problems hence required an integrated information system to improve service mechanism to society or obligatory Tax of interest. BPKB functions as Proof of Ownership of Motor Vehicles,

Law enforcement The application of criminal sanction against perpetrators of counterfeiting of BPKB, conducted on the basis of legal facts, both testimony of witnesses, evidence, and statement of defendant which is then poured in the indictment by the Public Prosecutor has been very precise. That is to ensnare the defendant with Article 263 (1) of the Criminal Code. Because all the elements contained in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code have been fulfilled and mutually matching and Barriers facing SAMSAT Kudus in tackling the Peeruan BPKB car, to reveal a case of counterfeiting BPKB is not an easy thing. Many obstacles faced by the SAMSAT, barriers faced by the SAMSAT Lack of public awareness to entrust the vehicle status to be purchased prior to the sale and purchase transactions in the SAMSAT office. There is still a network or group of BPKB counterfeit, no order and no machine on the vehicle of crime result

**Keywords: Legal Analysis and Counterfeiting**